

THE EFFECT OF CHARACTERISTICS OF LOCAL GOVERNMENTS AND BPK AUDIT OPINIONS ON FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS

(Empirical Study on Regencies/Cities in Papua Province in 2018-2019)

Abner SP Marlissa¹

abnermarlissa22@gmail.com

Dr. Siti Rofingatun, SE., MM., CBV., CGBA²

Rudiawie Larasati, SE., M.Ak³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Wealth Level, Dependency Level and Audit Opinion on Financial Performance. The independent variables in this study are the level of wealth, the level of dependence and audit opinion and the dependent variable is the financial performance. The population in this study was a total of 30 Regency/City Regional Governments of Papua Province who were recorded in the Financial Audit Agency for the 2018-2019 period. The sample in this study is the number of audit results reports at the Papua Province Regency/City Financial Audit Agency for the 2018-2019 period. The type of data in this study is quantitative data. The source of data used in this study is secondary data in the form of financial statements in 2018 to 2019 obtained from the Financial Audit Agency (BPK). Data analysis used descriptive statistics, classical assumption test, multiple analysis, and hypothesis testing. Results Based on the research shows that partially and simultaneously the Regional Wealth Level Audit, Dependence Level and Opinion have a significant effect on Financial Performance. This significant effect indicates that the expected hypothesis can be accepted. The significant hypothesis explains that a high level of regional wealth, dependence and audit opinion can increase the number of distributions of financial performance.

Keywords: *Regional Wealth Level, Regional Dependence Level and Audit Opinion on Regional Financial Performance.*

¹ Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

1. PENDAHULUAN

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Hendryadi, 2011), kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 (UU No. 32/2004) yang menegaskan bahwa kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi.

UU No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PPNo.3/2007) tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

PP No. 6/2008 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Setelah itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.

Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu pemda merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan audit BPK. Selain itu peneliti juga menambahkan variabel independen lain yang termasuk dalam karakteristik pemerintah daerah, yaitu belanja modal.

Belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nugroho dan Rohman (2012) Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Peneliti ini menggunakan hasil EKPPD tahun 2010, karena dengan menggunakan data tahun terkini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi saat ini tentang kinerja pemerintah daerah. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan mengetahui apakah variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?
2. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?
3. Apakah Opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?

2. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, *agen* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2005). Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung

terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *informatif asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

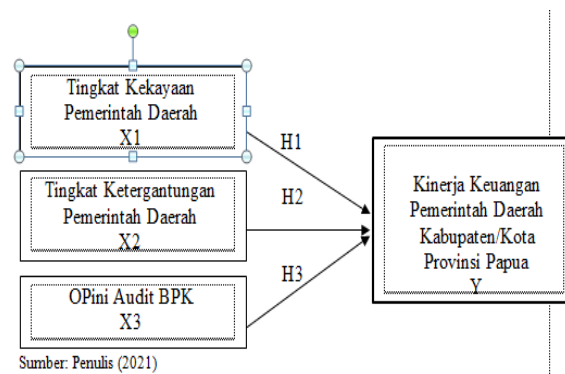
Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia dibentuk satu badan audit independen untuk mengaudit seluruh Pemda di Indonesia. Di Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

2.2 Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Salah satu elemen penopang akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi digambarkan sebagai “ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua negara demokrasi”. Transparansi berarti bahwa individu, grup, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu (Mahsun, 2006).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Rahmanurrajjid, 2008). Menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam Nugroho, 2012). Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.

***Hipotesis 1:** Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.*

2.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

***Hipotesis 2:** Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.*

2.3.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Provinsi Papua

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat

kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah.

Semakin baik opini audit BPK maka seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah Masdiantini dan Erawati (2016). Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah Masdiantini dan Erawati (2016). Semakin banyak opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Opini, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemerintah Daerah Sudarsana (2013). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Opini audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. maka hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 3 : Opini audit BPK Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3. METODE PENELITIAN

3.1.1 Variabel Penelitian Manajemen Laba (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2018-2019 tingkat nasional dengan *range* nilai 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian *portfolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2019 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pemeringkatan kinerja Pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri.

3.1.2 Variabel Tingkat Kekayaan Daerah

Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

3.1.3 Variabel Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus

3.1.4 Variabel Opini Audit BPK

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) pada dasarnya opini audit yang baik disektor privat maupun disektor publik dibedakan menjadi empat kategori yang diukur menggunakan skala ordinal yang diurutkan dari opini terburuk hingga opini terbaik yaitu (1) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), (2) Tidak Wajar (TW), (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (4) Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan (5) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

13	Kab. Keerom	2018	185,91	520,53	4	166,41
		2019	249,38	526,18	4	185,30
14	Kab. Yahukimo	2018	107,36	454,27	3	110,27
		2019	201,23	470,19	4	105,75
15	Kab. Pegunungan Bintang	2018	759,56	545,32	3	802,17
		2019	133,07	559,21	4	753,65
16	Kab. Tolikara	2018	110,78	459,90	1	112,06
		2019	628,04	500,45	3	104,10
17	Kab. Boven Digoel	2018	254,74	628,33	1	260,43
		2019	250,43	631,26	1	237,30
18	Kab. Mappi	2018	296,12	645,16	1	286,50
		2019	220,98	573,15	3	253,50
19	Kab. Asmat	2018	204,90	601,55	4	197,98
		2019	211,63	617,19	4	191,24
20	Kab. Waropen	2018	375,88	597,39	1	362,78
		2019	362,10	614,87	2	427,18
21	Kab. Supiori	2018	167,86	643,53	3	169,14
		2019	128,54	642,39	4	170,73
22	Kab. Mamberamo Raya	2018	726,06	674,59	1	692,42
		2019	648,42	650,08	1	632,15
23	Kab. Mamberamo Tengah	2018	672,07	586,99	1	677,03
		2019	210,93	673,65	1	759,31
24	Kab. Yalimo	2018	186,55	515,97	4	182,16
		2019	177,98	507,94	4	174,16
25	Kab. Lanny Jaya	2018	156,17	477,62	3	149,54
		2019	193,93	486,58	4	156,44
26	Kab. Nduga	2018	110,92	490,26	3	110,54
		2019	85,525	561,53	3	105,48
27	Kab. Dogiyai	2018	113,57	550,70	3	117,71
		2019	95,728	576,05	3	112,35
28	Kab. Puncak	2018	393,44	593,47	3	423,77
		2019	81,580	631,97	4	378,65
29	Kab. Intan Jaya	2018	766,27	613,56	3	804,62
		2019	114,33	644,08	3	808,58
30	Kab. Deiyai	2018	140,90	529,07	3	145,43
		2019	30,746	595,91	3	145,75

4.1.2 Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif untuk ditunjukkan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi terdapat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

descriptive statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	60	,0015	,1935	,031348	,0407164
TKD	60	,0014	,1929	,033737	,0411598
TKG	60	,172	,675	,53540	,111002
OPN	60	1	4	3.08	1.139
Valid N (listwise)	60				

Diketahui terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen, dan juga terdapat 30 sampel penelitian. Penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kekayaan Daerah (X1)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa Laba Akuntansi memiliki nilai terendah (minimum) sebesar ,0014 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar ,1929, nilai rata-rata (mean) sebesar ,033737 dengan standar deviasi sebesar ,0411598.

2. Tingkat Ketergantungan Daerah (X2)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa Tingkat Ketergantungan Daerah memiliki nilai terendah (minimum) sebesar ,172 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar ,675, nilai rata-rata (mean) sebesar ,53540 dengan standar deviasi sebesar ,111002.

3. Opini Audit (X3)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa Opini Audit memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 1 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 4, nilai rata-rata (mean) sebesar 3.08 dengan standar deviasi sebesar 1.139.

4. Kinerja Keuangan (Y)

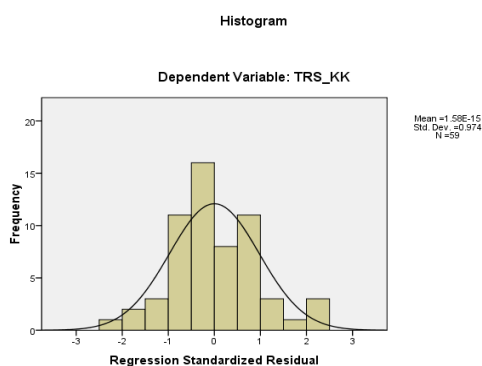
Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa Kinerja Keuangan memiliki nilai terendah (minimum) sebesar ,0015 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar ,1935, nilai rata-rata (mean) sebesar ,031348 dengan standar deviasi sebesar ,0407164.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat grafik dan melakukan uji *kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak.

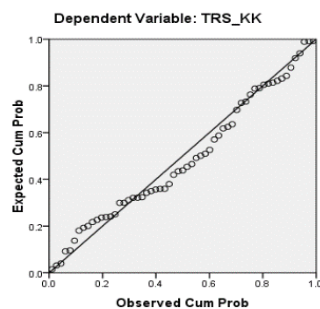
1. Analisis Grafik



Gambar 4.1 Grafik Normalitas

2. Snalisis Statistik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1.4.2. Uji Normalitas Setelah Transformasi

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters ^a	Mean	Normal Parameters ^a
	Std. Deviation	41577.3495844
Most Extreme Differences	Absolute	Most Extreme Differences
	Positive	.340
	Negative	-.220
Kolmogorov-Smirnov Z		.653
Asymp. Sig. (2-tailed)		.787

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel hasil uji One-Sample Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikan yang dapat dilihat pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar .787 yang berarti melebihi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan telah memenuhi uji normalitas.

4.1.4 Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil regresi yang terdapat pada Tabel 1.4.5.2 diperoleh nilai signifikansi sebesar .000 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 7,550, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu Tingkat Kekayaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat Kekayaan diperlukan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat keputusan dalam membagikan Kinerja Keuangan kepada Auditor. Tingkat Kekayaan Daerah dapat mempengaruhi jumlah Kinerja Keuangan karena jika semakin besar Kinerja Keuangan yang dihasilkan oleh Auditor, maka semakin besar pula jumlah dividen yang dibagikan dalam bentuk dividen kas atau tunai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

4.1.5 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil regresi yang terdapat pada Tabel 1.4.5.2. diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,023 yang mana lebih Besar dari 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 2,344, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yaitu Tingkat Ketergantungan Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat Ketergantungan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian Kinerja Keuangan kepada Auditor, Auditor menggunakan Tingkat Ketergantungan sebagai tolak ukur. Besarnya nilai Tingkat Ketergantungan menunjukkan besarnya hasil yang diperoleh pemerintah Daerah, sehingga Tingkat Kekayaan tersebut akan digunakan dalam pembagian kepada Auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan berpengaruh secara signifikan terhadap dividen kas.

4.1.6 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji F yang terdapat pada Tabel 1.4.5.2 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,023 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan nilai f-hitung sebesar $2,330 > 3,10$ (f-tabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yaitu Opini Audit Tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak memiliki Opini Audit baik, maka tidak dapat dibagikan oleh pemerintah Daerah karena tidak adanya dana yang digunakan atau disisihkan untuk pembagian Kinerja Keuangan. Apabila perusahaan memiliki Opini Audit yang Baik maka akan Baik Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2018-2019. Analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis linear berganda dengan aplikasi SPSS versi 23. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2018-2019 menggunakan sebanyak Pemerintah Daerah yang terpilih berdasarkan *purposive sampling* dengan total keseluruhan 30 sampel selama 2 tahun. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada populasi yang digunakan yaitu hanya pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan.
2. Banyaknya pemerintyah yang tidak membagikan Kinerja Keuangan.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas populasi penelitian agar mendapatkan sampel yang lebih banyak jumlahnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. . 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. . 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mustikarini dan Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin, 20-23 September 2012
- Julitawati, et al. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Kementerian Dalam Negeri RI. 2011. Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional. <http://otda.kemendagri.go.id/> diakses pada 3 Maret 2015. . 2012. Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional. <http://otda.kemendagri.go.id/> diakses pada 3 Maret 2015. . 2013. Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional. 228 Risma D A, Prayitno B, Alamsyah MT. Jurnal InFestasi Vol.11, No.2, Desember 2015 <http://otda.kemendagri.go.id/> diakses pada 20 Mei 2015.
- Hasibuan dan Abdul Nasser. 2009. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kusumawardani, Media.2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.
- Setyo Prayitno (2012). Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Perpustakaan, uns.ac, 2012.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.. Universitas 11 Maret. Surakarta.
- Suhardjanto dan Maranti (2010). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities. Journal Public Policy January 2010.
- Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Patrick, Patricia A. 2007. The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Ph.D. Dissertation, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 229 Risma D A, Prayitno B, Alamsyah MT. Jurnal InFestasi Vol.11, No.2, Desember 2015 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.